



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) 2019



PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2019



**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

**PROVINSI :** PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**NAMA PERANGKAT DAERAH:** DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3. Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan 4. Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 5. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan 6. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau 7. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut - Anggaran : Rp. 2.531.025.000,- - Realisasi : Rp. 2.088.370.371,-	7 Program	Lihat di APBD Lampiran 1.3 (Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada 1  1. SOP tentang Usaha Penangkapan Ikan	1 (satu)	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh menteri pembina

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Peraturan Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan ( PERDA/PERKADA Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau Tidak Ada	Ada 2 Perda <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda Prov. Kep. Bangka Belitung no. 02 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan di Wilayah Prov.Kep. Bangka Belitung</li> <li>- Perda Prov. Kep. Bangka Belitung no. 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</li> </ul>	Ada 2 Perda	Sumber data di Biro Hukum
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan yang ada sebanyak 27</li> <li>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 29</li> </ul>	93,10 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Ada yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas Perikanan ( 21 Orang)</li> <li>2. Pranata Humas (2 Orang)</li> <li>3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (1 Orang)</li> <li>4. Analis Pasar Hasil Perikanan (1 Orang)</li> </ol>	Ada (25 orang)	Sumber data BKD/perangkat daerah terakhir/update tahun 2019
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS sebanyak 96 personil</li> <li>- Total PNS Provinsi sebanyak 5.469 personil</li> </ul>	1,76 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan , sebanyak 26 orang</li> <li>- Pejabat, yang ada sebanyak 27 orang</li> </ul>	96.30 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 27 orang. Jabatan yang ada, sebanyak 29 jabatan	93,10%	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 2019 3. RENJA perubahan 4. RKA- SKPD 2019	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah , sebanyak 8 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 Program	88,89 %	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah , sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah , sebanyak 8 program.	100 %	
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 41.451.256.035 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp 3.064.703.819.549	1,35 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 28.391.089.333 - Total Realisasi Belanja Perangkat APBD, sebesar Rp 2.785.305.829.684	1,02 %	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp 15.986.438.766 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 28.391.089.333	56,31 %	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp 12.283.225.475 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 28.391.089.333	43,26 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Laporan Keuangan (ada 5 jenis) j, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. LO 4. LPE 5. CALK	Ada sebanyak 5 jenis	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya Inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada (dalam berita acara )	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp 117.799.956.205,49	0 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	<b>PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Leaflet Produk Perikanan 2. Website	Jumlah sebanyak 2 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	

**LAMPIRAN 1.3**  
**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN**  
**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelautan & Perikanan	1.	Produksi perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	247.323.821	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2.	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP	$= \frac{\sum_{i=1}^n (c_i \cdot 100\%)}{n}$ <p>Keterangan:  x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh  s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa  i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP</p>	90 %	Sumber Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		3.	Exspor hasil perikanan	<p>Nilai export hasil perikanan (ton pertahun) x 100% = <math>\frac{\text{Rp.344.072.295.647,-}}{\text{Rp. 284.429.958.404,-}}</math></p> <p>Target daerah</p>	120,97%	Sumber dari Data Dinas Kelautan dan Perikanan
		4.	Konsumsi ikan	<p>Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota = <math>\frac{433,8}{7}</math></p> <p>Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota</p>	61,97 Kg/kapita/tahun	Sumber Data dari agregasi Kabupaten dan Kota



### BAB III

#### URUSAN PILIHAN

##### 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan diperjelas oleh Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Provinsi Kepulauan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dibidang Kelautan dan Perikanan.

##### 2. Program dan Kegiatan

-	
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kelautan dan Perikanan	
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut</b>
6	Pembangunan Dermaga Jetty
7	Pembangunan/rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil (DAK)
8	Identifikasi dan Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut
9	Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut
10	Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah
<b>3</b>	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
12	peningkatan pelayanan perizinan perikanan tangkap
13	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (DAK)

14	Peningkatan dan Pengembangan PPI
15	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
16	Peningkatan kualitas SDM perikanan tangkap
17	Peningkatan pengelolaan sumber daya ikan
18	Peningkatan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan
19	peningkatan kesejahteraan nelayan
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan</b>
20	Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
22	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)
23	Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan
24	Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran
25	Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>
27	Pengawasan sumber daya kelautan
28	Pengawasan sumber daya perikanan
29	Pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan
30	Peningkatan fungsi BOOST Center
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan</b>
31	Peningkatan fungsi laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan
32	Pembinaan, supervisi dan sosialisasi penerapan standar mutu dan keamanan pangan produk hasil kelautan dan perikanan
33	Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau</b>
34	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)
35	Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut</b>
36	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)
37	Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)
38	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan (DAK)

## 2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melaksanakan urusan wajib melainkan urusan pilihan

## 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	11	-	11
		Gol. III	70	2	72
		Gol.II	13	-	13
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	1	-	1
		S2	13	-	13

		S1	50	2	52
		D. IV	4	-	4
		D. III	11	-	11
		D. II	1	-	1
		D.I	-	-	-
		SMA/ sederajat	14	-	14
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	7	-	7
		Eselon IV	19	-	19
		Fungsional:			
		Tertentu	25	-	25
		Umum	42	2	44
JUMLAH TOTAL			94	2	96

#### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	PD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.528.679.795	1.296.300.000	13.353.772.440	10.272.503.800	41.451.256.035	28.269.664.241	68,20	Dinas Kelautan dan Perikanan

#### 5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah sudah sesuai dengan Renstra dan Renja.

#### 6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, cukup atau Kurang)

PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA			KETERANGAN
	Lengkap	KURANG	MENCUKUPI	
Dengan analisa permasalahan bedasarkan tupoksi dan dibahas dalam musrenbang.	-	-	√	

## 7. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

1. Kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty pelaksanaan untuk DED Jetty di 4 lokasi sudah diadakan. Sementara untuk kegiatan fisik pembangunan dermaga jetty di Kurau tidak bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kegiatan perencanaan dan kegiatan fisik tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran apalagi untuk pekerjaan lelang. Karena akan berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan hanya terealisasi 62,7% hal ini disebabkan kurangnya anggaran makan minum dan tidak tersedianya uang saku peserta karena berlakunya system cost sharing untuk kegiatan Sosialisasi Asuransi Nelayan
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan karena kegiatan Sosialisasi dengan output yang sama telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Batam dengan mengundang seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu kegiatan pendataan perikanan tangkap tidak dilaksanakan karena pendataan statistik perikanan tangkap sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan *One Data*.
4. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (DAK) yg bs dilaksanakan hanya rehab drainase manggar, sumur bor di sungai selan gagal, karena s/d kedalaman 100m air masih payau, dan terjadi penurunan tanah.
5. Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK) hanya terealisasi 3 unit , 12 Tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan juknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Penyerapan kegiatan APBD Pengawasan Tindak Pidana kelautan dan Perikanan yang tidak terserap maksimal, hal tersebut dikarenakan tidak diakomodir/ditandatangani pengajuan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus penyidikan.

7. Adanya Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pada UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut) menyebabkan berkurang siklus produksi pembenihan dan pembesaran ikan sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran untuk pembelian bibit ternak, pakan ternak dan peralatan budidaya ikan

b. Solusi

1. Meningkatkan konsolidasi internal terhadap hasil pencapaian target Program Pembangunan sebagaimana yang telah dicapai pada tahun 2019;
2. Menempatkan ASN yang tepat pada kegiatan yang tepat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lebih baik;
3. Mengevaluasi target pencapaian tahun 2019 sebagai bahan untuk mencapai target kedepan.

8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada

## **BAB IV**

### **REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019**

Pada tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 2 program nasional yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dan Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan. Dalam pelaksanaannya kedua program nasional tersebut dijabarkan ke dalam 4 program. Adapun 4 program tersebut yaitu:

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengembangan Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. Program pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta sumberdaya perikanan.

Pengukuran kinerja merupakan proses pengukuran (assessment) kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi atas output yang dihasilkan, kualitas output termasuk kualitas layanan yang diberikan. Ini berarti bahwa capaian kinerja adalah tingkat penggunaan input (berupa alokasi anggaran) untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu (Keluaran/Output) dengan tingkat efisiensi yang seoptimal mungkin. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dan juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai terjadi dengan kinerja yang diharapkan/ditargetkan.

**Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja DKP Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2019**

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN	PERSEN TASE CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya wilayah Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dapat dibangun dengan baik	Persentase Wilayah berbasis desa pesisir yang terbangun (%)	1,6	0	0
2.	Meningkatnya wilayah Kelautan dan Perikanan yang di awasi	Persentase Wilayah berbasis desa pesisir yang diawasi (%)	26,20	27,33	104,20
3.	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap	Nilai Produktivitas perikanan tangkap (Kg/Org/Tahun)	4650	4716,81	101,44
4.	Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya	Nilai Produktivitas perikanan budidaya (Kg/Org/Tahun)	1850	1898,44	102,62
5.	Meningkatnya produktivitas pengolahan perikanan	Nilai Produktivitas pengolahan perikanan (Kg/Org/Tahun)	950	4.550,19	478,97
6.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bidang perikanan tangkap	bidang perikanan tangkap (Rp.000)	-	84.217.600	100
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bidang perikanan budidaya	Pendapatan Asli Daerah bidang perikanan budidaya (Rp.000)	300.000	57.761.000	19,25
8.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bidang pengolahan dan penerapan mutu	Pendapatan Asli Daerah bidang pengolahan dan penerapan mutu (Rp.000)	-	6.363.000	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>125,81</b>

Terdapat 8 (delapan) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019. berdasarkan tabel tertera di atas maka dapat disampaikan terdapat 7 (tujuh) indikator yang telah melampaui target yang telah ditetapkan dari total 8 (delapan) indikator yang ada.

Jika kita tilik lebih jauh lagi terdapat (dua) indikator yang belum diberikan target untuk menghasilkan PAD, yaitu Bidang Pengolahan dan Penerapan Mutu, namun sudah memberikan kontribusi PAD bagi Pemerintah Provinsi walaupun masih dalam jumlah yang kecil sebagai permulaan. Untuk penjelasan lebih lanjut atas capaian yang telah dilampaui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 yang lalu dapat disampaikan sebagai berikut:

### 1. Capaian Sasaran Strategis 1 (satu)

Tabel. 3.2. Capaian Sasaran Strategis 1

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN KINEERJA SASARAN	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya wilayah Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dapat dibangun dengan baik	Persentase Wilayah berbasis desa pesisir yang terbangun (%)	1,6	0	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja untuk sasaran strategis 1 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,6%. Realisasi capaian kinerja sasaran yang dicapai adalah sebesar **0%**. Adapun base data yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah jumlah desa pesisir yang telah terbangun fasilitas sarana dan prasarana pesisirnya dengan baik dibandingkan dengan jumlah total desa pesisir yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak **188 desa pesisir** dan setelah diakumulasikan belum ada **desa pesisir** yang telah dibantu fasilitas untuk daerah pesisirnya melalui APBD maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) Provinsi. Hal ini terjadi dikarenakan pembangunan Jetty yang sekiranya akan dibangun pada tahun 2019 di 4 desa pesisir belum dapat dilaksanakan (3 jetty melalui dana APBD dan 1 jetty melalui dana DAK) mengingat dokumen yang diperlukan untuk mengeluarkan rekomendasi alokasi ruang di daerah pesisir dan pulau pulau kecil belum selesai diperdakan, yaitu Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil). Sekiranya kegiatan ini tadinya dapat dilaksanakan maka target yang telah ditetapkan sebesar 1,6% sudah dapat dilampaui.

### 2. Capaian Sasaran Strategis 2 (dua)

1.

**Tabel. 3.3. Capaian Sasaran Strategis 2**

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN KINEERJA SASARAN	PERSENTASE CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya wilayah Kelautan dan Perikanan yang di awasi	Persentase Wilayah berbasis desa pesisir yang diawasi (%)	26,20	27,33	104,20

Tabel di atas menunjukkan bahwa usaha dari Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melampaui dari target yang ditetapkan, sehingga capaian atas indikator kinerja sasaran ini mencapai **104,20%**. Adapun dasar perhitungan atas indikator kinerja sasaran ke-2 ini adalah seluruh wilayah yang sudah dilaksanakan tindakan patroli dibandingkan dengan jumlah total luas wilayah perairan yang berada di bawah kewenangan provinsi, yaitu dari titik 0 (Nol) sampai dengan jarak 12 (dua belas) mil laut. Di dalam draft perda RZWP3K dan merupakan hasil studi lapangan dinyatakan bahwa luas laut perairan yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah seluas 44.151,28 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 2.375,92 Km. Berdasarkan pola patroli yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan untuk wilayah Bangka Belitung ini, maka luas wilayah yang dapat diawasi pada tahun 2019 secara akumulatif adalah seluas 12.066,54 Km<sup>2</sup> atau setara **27,33%** dari total wilayah perairan yang menjadi kewenangan provinsi sehingga telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 26,20%.

### 3. Capaian Sasaran Strategis 3 (tiga)

**Tabel. 3.4. Capaian Sasaran Strategis 3**

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN KINEERJA SASARAN	PERSEN TASE CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap	Nilai Produktivitas perikanan tangkap (Kg/Org/Tahun)	4.650	4.716,81	101,44

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan sudah dapat juga melampaui target indikator yang telah ditetapkan di dalam renstra DKP 2017-2022 untuk indikator produktivitas perikanan tangkap. Tabel menunjukkan

bahwa capaian kinerja sasaran ke-3 ini adalah sebesar **101,44%**. Adapun dasar yang digunakan untuk menghitung angka keberhasilan ini adalah dengan membandingkan volume produksi perikanan tangkap yang dihasilkan dengan jumlah nelayan yang bergerak di bidang perikanan tangkap. Data Statistik 2019 menunjukkan bahwa volume produksi perikanan tangkap adalah sebesar 219.435,26 Ton, sedangkan jumlah nelayan yang ada adalah sebanyak 46.522 orang. Sehingga hasil perbandingan menunjukkan nilai produktivitas untuk tahun 2019 adalah sebesar 4716,81 Kg/Org/Tahun. Jika dibandingkan dengan target di dalam renstra dan juga perjanjian kinerja sebesar 4.650 maka target telah terlampaui dengan baik. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap salah satunya adalah pengadaan bantuan kapal <3GT, seperti tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 3.5. Desa Pesisir Penerima Manfaat**

No.	Bentuk Bantuan Sarpras	Desa Penerima Manfaat	Keterangan
1.	Bantuan Pengadaan Kapal ukuran <3 GT	Desa Kurnia Jaya	Kab. Belitung Timur
2.	Bantuan Pengadaan Kapal ukuran <3 GT	Desa Kulur Ilir	Kab. Bangka Tengah
3.	Bantuan Pengadaan Kapal ukuran <3 GT	Desa Tanjung Niur	Kab. Bangka Barat
4.	Bantuan Pengadaan Kapal ukuran <3 GT	Desa Air Itam	Kota Pangkalpinang
5.	Bantuan Pengadaan Kapal ukuran <3 GT	Desa Pancur	Kota Pangkalpinang
6.	Bantuan Pengadaan Kapal ukuran <3 GT	Desa Lontong Pancur	Kota Pangkalpinang
7.	Bantuan Pengadaan Kapal ukuran <3 GT	Desa Matras	Kab. Bangka
8.	Bantuan Pengadaan Kapal ukuran <3 GT	Desa Parit Pekir	Kab. Bangka

#### **4 . Capaian Sasaran Strategis 4 (empat)**

**Tabel. 3.6. Capaian Sasaran Strategis 4**

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN KINEERJA SASARAN	PERSENTA SE CAPAIAN (%)
4.	Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya	Nilai Produktivitas perikanan budidaya (Kg/Org/Tahun)	1.850	1.898,44	102,62

Tidak jauh berbeda dari produktivitas perikanan tangkap, produktivitas perikanan budidaya juga menunjukkan angka yang telah melampaui target yang ada di dalam renstra DKP. Dari sisi jumlah volume memang bidang perikanan budidaya belum menunjukkan data produksi yang baik, namun demikian usaha yang dilakukan oleh DKP sebagai pemegang kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sub sektor perikanan budidaya ini akan terus dikembangkan ke depan. Adapun persentase hasil capaian kinerja menunjukkan angka **102,62%**. Data Statistik 2019 menunjukkan bahwa terdapat volume produksi perikanan budidaya sebesar 2.999,54 Ton, sedangkan jumlah pembudidaya yang ada adalah sebanyak 1.580 orang. Sehingga hasil perbandingan menunjukkan angka nilai produktivitas untuk tahun 2019 adalah sebesar 1.898,44 Kg/Org/Tahun. Jika dibandingkan dengan target di dalam renstra dan juga perjanjian kinerja yang sebesar 1.850 maka target telah terlampaui dengan baik.

## 5. Capaian Sasaran Strategis 5 (lima)

Tabel. 3.7. Capaian Sasaran Strategis 5

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN KINEERJA SASARAN	PERSENTA SE CAPAIAN (%)
5.	Meningkatnya produktivitas pengolahan perikanan	Nilai Produktivitas pengolahan perikanan (Kg/Org/Tahun)	950	4.550,19	478,97

Senada dengan produktivitas perikanan tangkap dan produktivitas perikanan budidaya, produktivitas pengolahan juga menunjukkan angka capaian yang menggembirakan. Hal ini menunjukkan korelasi yang positif antara produksi perikanan tangkap dengan jumlah produk olahan. Adapun persentase hasil capaian kinerja menunjukkan angka yang sangat signifikan atas target yang ditetapkan di dalam renstra. Adapaun angka capaian kinerjanya adalah sebesar **478,97%**. Data Statistik 2019 menunjukkan bahwa terdapat volume produksi produk olahan sebesar 8.345,05 Ton sedangkan jumlah pengolah yang ada adalah sebanyak 1.834 orang. Sehingga hasil perbandingan menunjukkan angka nilai produktivitas untuk tahun 2019 adalah sebesar 4.550,19 Kg/Org/Tahun. Jika dibandingkan dengan target di dalam renstra dan juga perjanjian kinerja yang sebesar 950 maka target telah terlampaui dengan baik.

## 6. Capaian Sasaran Strategis 6 (Enam)

Tabel. 3.8. Capaian Sasaran Strategis 6

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN KINEERJA SASARAN	PERSEN TASE CAPAIAN (%)
6.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bidang perikanan tangkap	bidang perikanan tangkap (Rp.000)	-	84.217.600	100

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sekarang menjadi kewenangan provinsi, sehingga di dalam renstra DKP bidang perikanan tangkap melalui PPI nya juga diberikan tanggung jawab untuk mencari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun, karena tahun 2019 baru berupa pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, maka belum diberikan target PAD. Tapi pada kenyataannya proses pengalihan untuk sebagian PPI sudah dapat dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga sudah dapat menghasilkan PAD. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan sudah mencapai kinerja sebesar **100%**, karena sudah dapat menghasilkan PAD dari bidang perikanan tangkap sebesar Rp.84.217.600,- dari target sebesar Rp.0,.

## 7. Capaian Sasaran Strategis 7 (Tujuh)

Tabel. 3.9. Capaian Sasaran Strategis 7

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN KINEERJA SASARAN	PERSEN TASE CAPAIAN (%)
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bidang perikanan budidaya	Pendapatan Asli Daerah bidang perikanan budidaya (Rp.000)	300.000	57.761.000	19,25

Berbanding terbalik dengan PAD bidang perikanan tangkap, maka PAD bidang perikanan budidaya yang diperoleh dari BPI (Balai Pemuliaan Ikan) belum menunjukkan capaian yang menggembirakan, karena persentase capaian kinerja yang diperoleh baru sebesar **19,25%** saja. Di dalam perjalanannya, BPI hanya

mampu menghasilkan PAD sebesar Rp. 57.761.000,- saja dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,-. Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pada tahun anggaran 2019 yang lalu, BPI mendapatkan anggaran dari DAK yang cukup besar, yaitu Rp.1.305.512.000,-, namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terjadi perubahan nomenklatur balai benih pada tanggal 19 Maret 2019, sedangkan perubahan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) DAK paling lambat dapat diterima oleh Kementerian Keuangan adalah pada minggu pertama bulan Maret 2019, sehingga perubahan RKA sebagai dasar perubahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tidak dapat dilakukan lagi mengingat terjadi perubahan nomenklatur di dalam DPA. Di dalam DPA masih tertera lokasi kegiatan adalah Balai Benih Ikan Air Payau dan Balai Benih Ikan Laut, yang mana sudah berubah menjadi Balai Pemuliaan Ikan. Oleh sebab itu, kegiatan DAK ini tidak dapat dilaksanakan yang mengakibatkan belum terpenuhinya fasilitas pembenihan yang dibutuhkan oleh Balai untuk memproduksi benih sebagai bahan untuk menghasilkan PAD.

## 8. Capaian Sasaran Strategis 8 (Delapan)

Tabel. 3.10. Capaian Sasaran Strategis 8

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN KINEERJA SASARAN	PERSEN TASE CAPAIAN (%)
8.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bidang pengolahan dan penerapan mutu	Pendapatan Asli Daerah bidang pengolahan dan penerapan mutu (Rp.000)	-	6.363.000	100

Di dalam dokumen Renstra DKP, bidang pengolahan dan penerapan mutu juga sama dengan bidang perikanan tangkap belum diberikan target untuk menghasilkan PAD dikarenakan sebagian besar kewenangannya sudah diserahkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini PUSKARI (Pusat Karantina Ikan). Namun, dalam kenyataannya LPPMHP (Laboratorium Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan) tetap berinovasi dengan memberikan layanan uji Organoleptik yang dibutuhkan oleh para pengusaha untuk menyatakan bahwa komoditas yang mereka akan jual bebas dari bahan berbahaya seperti formalin. LPPMHP telah menghasilkan PAD sebesar Rp. 6.363.000,- dari target sebesar Rp. 0,-. Capaian kinerja yang tercatat adalah **100%**.

Secara keseluruhan, dari 8 (delapan) Indikator Sasaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ataupun yang lebih umum dikenal dengan istilah IKU (Indikator Kinerja Utama), terdapat 6 (enam) IKU yang sudah terlampaui dari target yang ditetapkan dan tinggal 2 (dua) IKU saja yang belum mencapai target. Secara rata-rata pencapaian, maka DKP juga telah melampaui target 100%, yaitu sebesar **125,81%**. Hal ini tidak akan tercapai tanpa sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dikoordinir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan seluruh stake holdernya, seperti contoh para Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan dan Dinas Perikanan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas pendukung sarana dan prasarana seperti Dinas Pekerjaan Umum yang menyediakan jalan dan jembatan menuju pusat kegiatan kelautan dan perikanan, Dinas Pariwisata yang bersinergi untuk mendukung dari sisi penyediaan wisatawan lokal maupun manca negara untuk menikmati produk kuliner maupun produk olahan yang dihasilkan oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan serta Dinas Perhubungan yang membantu kelancaran proses keluar masuknya produk kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

**BAB V**  
**TUGAS PEMBANTUAN ( TP )**

Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2019 tidak menerima alokasi anggaran Dana Tugas Perbantuan (TP).

1.3.1. DATA PERIKANAN

No.	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA*	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP*	TOTAL PRODUKSI*
1	BANGKA	1.350.494,41	31.736.008,57	33.086.502,97
2	BANGKA BARAT	358.361,77	15.586.351,35	15.944.713,12
3	BANGKA SELATAN	156.280,72	40.124.356,22	40.280.636,94
4	BANGKA TENGAH	1.496.657,47	26.087.037,21	27.583.694,69
5	BELITUNG	211.343,99	71.391.051,60	71.602.395,59
6	BELITUNG TIMUR	71.776,26	44.563.800,60	44.635.576,86
7	PANGKAL PINANG	5.882.835,38	8.307.464,80	14.190.300,18
	BANGKA BELITUNG	9.527.750,00	237.796.070,35	247.323.820,35

\*) Data sangat sementara

Sumber Data dari Data Satu Data KKP

KEPALA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN



**DASMINTO, S.Pi, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19661207 199503 1 001**

1.3. 2 .PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KP TAHUN 2019

<b>Nelayan</b>	
Pelaku usaha yang diperiksa	80
Yang Taat	56
Tidak Taat	24
<b>Pengolahan</b>	11
Pelaku usaha yang diperiksa	11
taat aturan	11
<b>Budidaya</b>	4
Pelaku usaha yang diperiksa	4
Taat Aturan	4
<b>Total Pelaku Usaha yang diperiksa (s_i)</b>	<b>95</b>

Sumber Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan

KEPALA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN



**DASMINTO, S.Pi, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19661207 199503 1 001**

1.3. 3. EKSPOR HASIL PERIKANAN

BULAN	TON	Rp.
JANUARI	1.060,0	34.296.601.629
FEBRUARI	795,6	25.742.107.984
MARET	1.097,4	35.507.393.489
APRIL	1.038,9	33.615.490.761
MEI	1.008,8	32.642.521.459
JUNI	560,1	18.121.755.468
JULI	932,1	30.159.459.797
AGUSTUS	699,4	22.629.382.783
SEPTEMBER	741,4	23.989.986.678
OKTOBER	874,0	28.279.529.089
NOVEMBER	877,0	28.376.923.089
DESEMBER	949,1	30.711.143.422
	10.633,7	344.072.295.648

Nilai export hasil perikanan (ton pertahun) : Rp. 344.072.295.648,-

Target daerah : Rp 284.429.958.404,-

KEPALA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN



**DASMINTO, S.Pi, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19661207 199503 1 001**

**1.3.4. ANGKA KONSUMSI IKAN 2019 KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	KABUPATEN/KOTA	ANGKA KONSUMSI IKAN	
1	BANGKA TENGAH	55,18	KG/KAPITA
2	BANGKA	68,46	KG/KAPITA
3	BANGKA SELATAN	73,44	KG/KAPITA
4	BANGKA BARAT	52,65	KG/KAPITA
5	BELITUNG	59,42	KG/KAPITA
6	BELITUNG TIMUR	50,37	KG/KAPITA
7	PANGKALPINANG	74,28	KG/KAPITA
	TOTAL	433,8	
	BANGKA BELITUNG	61,97	KG/KAPITA

Sumber data dari Dinas Perikanan kabupaten Kota

\*) Sumber data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (data sementara)

**KEPALA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**DASMINTO, S.Pi, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661207 199503 1 001**